

**ANALISIS STATUS *OPEN DEFECATION FREE* (ODF) TERHADAP
KETERSEDIAAN LAHAN DAN STATUS EKONOMI DI
KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM**

Ahmadi¹, Roni Saputra², Udin Kurniawan Aziz³

^(1,2) Universitas Ibnu Sina, Kota Batam, Indonesia

⁽³⁾Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Indonesia

email: *¹ahmadi@uis.ac.id, ²roni.saputra@uis.ac.id, ³uphin.kurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Program STBM Pilar Satu di Kecamatan Sagulung Kota Batam yang dimulai dari Tahun 2018 secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan maksimal dengan hasil yang masih jauh dari target SDG's 2030 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Kepulauan Riau No. 0168/106/SET tentang target akses universal sanitasi 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status Open Defecation Free (ODF) terhadap ketersediaan lahan dan status tingkat ekonomi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode kuantitatif dengan rancang bangun menggunakan cross sectional study. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sagulung pada bulan April – Mei 2020, sampel penelitian ditentukan dengan teknik sample random sampling yaitu sebanyak 90 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung terdapat 3 Kelurahan yang sudah terverifikasi ODF dan 3 Kelurahan belum terverifikasi ODF, dengan status mempunyai lahan untuk membangun jamban adalah sebanyak 25 sampel (27,8%) dan tidak mempunyai lahan untuk membangun jamban dan septik tank adalah sebanyak 65 sampel (72,2%) dengan nilai $p\text{-value} = 0,585$ sedangkan tingkat ekonomi dengan status baik adalah sebanyak 58 sampel (64,4%) dan buruk adalah sebanyak 32 sampel (35,6%) dengan nilai $p\text{-value} = 0,274$.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan lahan dan status ekonomi terhadap status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Diperlukan pendekatan lain oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dengan cara melakukan advokasi kepada pemerintah setempat untuk mempercepat pembangunan jamban komunal di Kecamatan Sagulung dan melakukan pendekatan kepada keluarga untuk berperilaku peduli kepada lingkungan, merubah daerah pesisir menjadi daerah wisata agar masyarakat malu untuk BAB sembarangan serta perlunya menggerakkan tokoh masyarakat untuk menerapkan kebijakan tertulis yang disepakati oleh masyarakat setempat untuk mendorong agar masyarakat tidak BAB di sembarang tempat lagi..

Kata kunci: Ketersediaan Lahan, Status Ekonomi, ODF

ABSTRACT

The implementation of the First Pillar STBM Program in Sagulung District, Batam City, which began in 2018 as a whole, has not been carried out optimally with results that are still far from the SDGs 2030 target and the Circular (SE) of the Governor of Riau Islands No. 0168/106 / SET regarding the 2019 universal access target for sanitation. The purpose of this study was to analyze the Open Defecation Free (ODF) status on land availability and economic level status in Sagulung District, Batam City. This research is an observational study with a quantitative method with a cross-sectional design. The research was conducted in Sagulung District from April to

May 2020, the research sample was determined by random sampling technique, namely as many as 90 samples. The results showed that of the 6 Village in Sagulung District, there were 3 Village that had been ODF verified and 3 Village had not been ODF verified, with the status of having land to build latrines were 25 samples (27.8%) and did not have land to build latrines and septic tanks were as many as 65 samples (72.2%) with a p-value is = 0.585 while the economic level with good status was 58 samples (64.4%) and bad was 32 samples (35.6%) p-value = 0.274. From the results of this study it can be concluded that there is no relationship between land availability and economic status for ODF status in Sagulung District, Batam City. It is hoped that the Batam City Health Office can advocate for the local government to build more communal latrines in Sagulung District and turn coastal areas into tourist areas so that people are ashamed of open defecation and the need to mobilize figures to implement policies or written regulations agreed upon by the local community to encourage so that people do not defecate anywhere anymore.

Keywords: Economic Status, Land Availability, ODF

PENDAHULUAN

Perilaku buang air besar sembarangan atau juga disebut dengan open defecation merupakan salah satu perilaku hidup yang tidak sehat. Yang dimaksud dengan buang air besar sembarangan (BABS) adalah perilaku/tindakan membuang tinja/kotoran manusia di tempat terbuka seperti di sawah, ladang, semak-semak, sungai, pantai, hutan, laut, dan area terbuka lainnya. Pembuangan tinja secara sembarangan ini akan memberikan efek buruk bagi kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit berbasis lingkungan bagi orang yang terkontaminasi pada tinja tersebut. Berbagai penyakit yang menjadi akibat dari sanitasi buruk antara lain penyakit diare, kecacingan, hepatitis A, scabies, trachoma, hepatitis E dan malnutrisi. Sebagai upaya untuk menurunkan presentase angka kesakitan maupun kematian akibat sanitasi buruk, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) guna untuk meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadi pilar pertama yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Open Defecation Free (ODF) adalah salah satu kondisi suatu masyarakat telah melakukan sanitasi total dengan tidak membuang air besar sembarangan lagi (BABS). Suatu desa dapat dikatakan ODF jika 100% penduduk desa sudah tidak BAB sembarangan lagi dan sudah memiliki akses jamban sehat (The Word Bank Group. 2018). Untuk menurunkan tingkat perilaku BAB sembarangan tersebut pemerintah telah merumuskan program sejak tahun 2008 yang tertuang didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang strategi nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 03 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Dengan diluncurkannya program STBM ini merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan target yang tertuang didalam program Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 yang berisi tentang 17 tujuan, salah satunya adalah tersedianya akses air bersih dan sanitasi, setiap Negara ditargetkan harus mampu mencapai target tujuan SDGs tersebut guna untuk pembangunan secara berkelanjutan (Sustainable Development Goals. 2015), serta mensukseskan program BKKBN dengan 8 tujuan program yang

salahsatunya adalah menciptakan keluarga peduli terhadap lingkungan dan berperilaku hidup bersih dan sehat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas (BKKBN, 2013).

Untuk meneruskan amanah dari Permenkes tersebut pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah merumuskan dan menargetkan capaian akses sanitasi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan didalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9768/106/SET tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dalam Rangka Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 2019. Dari hasil data monitoring evaluasi Kementerian Kesehatan Tahun 2018 didapatkan hasil bahwa dari peringkat atau ranking capaian program STBM di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau masih termasuk provinsi dengan capaian program ODF terendah yaitu pada posisi ranking ke 26 dengan persentase akses sanitasi sebesar 67,69%, desa yang melaksanakan STBM sebanyak 56,73% (236 Kelurahan) dan yang telah terverifikasi ODF adalah sebanyak 13,94% (58 Kelurahan).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke 32 di Indonesia dengan penduduk terkonsentrasi di Kota Batam. Sekitar 62% penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Perekonomian yang banyak terpusat di Kota Batam menjadi penyebab banyaknya penduduk yang tinggal di Kota Batam. Hal ini juga ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Batam Tahun 2017 yang mencapai 3,63%, hingga Tahun 2018 jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.329.773 jiwa, yang terdiri dari 678.068 orang penduduk laki-laki dan 651.705 orang perempuan dan penduduk terbanyak dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Batam adalah penduduk Kecamatan Sagulung yaitu sebanyak 181.490 jiwa dengan dibantu oleh 2 puskesmas induk yaitu Puskesmas Sungai Langkai dan Puskesmas Sungai Lekop (BPS Kota Batam Dalam Angka 2018).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2019 jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung adalah sebanyak 6 Kelurahan, dengan status terverifikasi ODF adalah sebanyak 3 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Lekop, Sagulung Kota dan Sungai Binti, sedangkan 3 Kelurahan lainnya belum terverifikasi ODF yaitu Kelurahan Tembesi, Sungai Pelunggut dan Sungai Langkai.

Dari hasil wawancara pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Desember 2019 terhadap pemegang program STBM di Puskesmas Sungai Langkai dan Puskesmas Sungai Lekop menunjukkan bahwa perubahan perilaku BABS melalui program STBM pilar satu dirasakan sangat sulit diwujudkan terutama diwilayah kerja Puskesmas Sungai Langkai, selain karena faktor ekonomi, faktor geografis juga sangat mempengaruhi untuk tercapainya 100% ODF di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Berdasarkan informasi diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh ketersediaan lahan dan status ekonomi terhadap status Open Defecation Free (ODF) di Kecamatan Sagulung Kota Batam

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yaitu penelitian dengan melakukan kegiatan pengamatan tanpa melakukan intervensi apapun terhadap subjek penelitian dengan metode kuantitatif. Rancang bangun pada penelitian ini adalah *cross sectional*

study. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sagulung Kota Batam dimulai dari bulan Februari sampai April 2020, dengan jumlah populasi adalah sebanyak 90 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status ODF

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung terdapat 3 Kelurahan yang sudah terverifikasi ODF dan 3 kelurahan lainnya belum terverifikasi ODF.

2. Ketersediaan Lahan

Dari hasil penelitian didapat bahwa responden yang mempunyai lahan untuk membangun jamban dan *septik tank* adalah sebanyak 25 responden (27,8%) dan yang tidak mempunyai lahan adalah sebanyak 65 responden (72,3%).

3. Status Tingkat Ekonomi

Dari hasil penelitian didapat bahwa responden yang mempunyai status ekonomi baik dengan penghasilan diatas UMK Kota Batam adalah sebanyak 58 responden (64,4%) sedangkan yang mempunyai status ekonomi buruk dengan penghasilan dibawah UMK Kota Batam adalah sebanyak 32 responden (35,6%).

4. Analisis Ketersediaan Lahan Terhadap Status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Analisis ketersediaan lahan terhadap status ODF pada penelitian ini dilakukan berdasarkan ketersediaan lahan responden untuk membangun jamban dan septik tank untuk BAB di jamban sehatn, adapun distribusi frekuensi ketersediaan lahan terhadap status ODF pada responden di Kecamatan Sagulung Kota Batam dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Distribusi Frekuensi Ketersediaan Lahan Terhadap Status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Ketersediaan Lahan	Perilaku BAB				Jumlah N		p-value
	Dijamban	Sehat	Sembar	angan			
	n	%	n	%		%	
Ada	10	40	15	60	25	100	0,585
Tidak ada	22	33,8	43	66,2	65	100	
Total					90	100	

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki lahan dengan perilaku BAB di jamban sehat adalah sebanyak 10 responden (40%) dan yang berperilaku BAB sembarangan adalah sebanyak 15 responden (60%) sedangkan responden yang tidak memiliki lahan dengan perilaku BAB di jamban sehat adalah sebanyak 22 responden (33,8%) dan yang berperilaku BAB sembarangan adalah sebanyak 43 responden (66,2%) dengan nilai p-value sebesar 0,585 ($p > \alpha$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara ketersediaan lahan dengan kejadian BAB sembarangan di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Hal ini diasumsikan bahwa ketersediaan lahan untuk membangun

jamban dan septik tank bukan masalah utama terhadap perilaku BAB sembarangan yang terjadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hadiati Sukma, dkk (2018) tentang hubungan pengetahuan, sikap BAB dan kepemilikan lahan untuk membangun septik tank dengan status ODF di Kecamatan Candisari Kota Semarang didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kepemilikan lahan untuk membangun septik tank dengan status ODF dengan hasil dari 57 responden yang memiliki jamban di rumah hanya 17 responden (25,4%) yang memiliki septik tank dan 40 responden (59,7%) yang tidak memiliki septik tank dengan nilai p-value sebesar 0,000, dari 40 responden yang tidak memiliki septik tank 43,3% beralasan karena tidak ada biaya dan 22,4% menjawab karena tidak memiliki lahan.

5. Analisis Status Ekonomi Terhadap Status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Analisis status ekonomi terhadap status ODF pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat dengan standar UMK Kota Batam yaitu Rp. 3.500.000,-, adapun distribusi frekuensi status ekonomi terhadap status ODF pada responden di Kecamatan Sagulung Kota Batam dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Status Ekonomi Terhadap Status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam

Status Ekonomi	Perilaku BAB				Total		<i>p-value</i>
	<u>Dijamban Sehat</u>		Sembarangan		N	%	
	n	%	n	%			
Baik	23	39,7	35	60,3	25	100	0,274
Buruk	9	28	23	72	65	100	
Total					90	100	

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki status ekonomi baik dengan perilaku BAB di jamban sehat adalah sebanyak 23 responden (39,7%) dan yang berperilaku BAB sembarangan adalah sebanyak 35 responden (60,3%) sedangkan responden yang memiliki status ekonomi buruk dengan perilaku BAB di jamban sehat adalah sebanyak 9 responden (28%) dan yang berperilaku BAB sembarangan adalah sebanyak (72%) dengan nilai p-value sebesar 0,274 ($p > \alpha$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara status ekonomi dengan kejadian BAB sembarangan di Kecamatan Sagulung Kota Batam, hal ini diasumsikan bahwa faktor ketersediaan lahan dan status ekonomi bukan merupakan faktor utama terhadap tingginya tingkat kejadian BAB sembarangan di Kecamatan Sagulung Kota Batam, masih terdapat beberapa faktor pencetus yang lebih berpengaruh terhadap tingginya tingkat perilaku BAB sembarangan yang terjadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam, termasuk faktor tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran hidup bersih dan sehat, sosial budaya dan kebijakan pemerintah setempat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windy Febriani, dkk (2016) tentang faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS): Studi Pada Program STBM Di Desa Sumbersari Metro Selatan 2016 didapatkan hasil bahwa pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku Stop BABS di

peroleh nilai $p = < 0,001$, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dukungan sosial terhadap perilaku Stop BABS di Desa Purwoasri Kota Metro 2016.

SIMPULAN

1. Secara keseluruhan dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sagulung Kota Batam yang telah terverifikasi ODF adalah sebanyak 3 Kelurahan dan yang belum terverifikasi ODF adalah sebanyak 3 Kelurahan.
2. Tidak ada hubungan antara ketersediaan lahan dengan status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan nilai $p\text{-value} = 0,585$
3. Tidak ada hubungan antara status ekonomi dengan status ODF di Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan nilai $p\text{-value} = 0,274$

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2018, *Indeks Pembangunan Manusia*. Katalog: 4102002.2171.
2. Badan Pusat Statistik Kecamatan Sagulung, 2019. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Kecamatan Sagulung Dalam Angka 2019.
3. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). (2013). Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Ditinjau dari Aspek Delapan Fungsi Keluarga. Jakarta: BKKBN Pusat.
4. Chandra, B, 2010, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit buku kedokteran EGC, Jakarta.
5. Dinas Kesehatan Kota Batam, 2018, *Data Monitoring STBM Tahun 2014-2018*, Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Fera N, dkk. (2017). Determinan Kepemilikan Jamban Sehat Di Desa Sukomulyo Martapura Palembang. *Jurnal Ilmu Kesehatan* 2(2) 2017, 107-116.
7. Fujiati, E. (2017). Evaluasi Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pada Pilar Pertama ODF (*Open Defecation Free*) Berbasis Wilayah Puskesmas Dengan Pendekatan Modifikasi *Logic Model* Di Kabupaten Banyuwangi. *Tesis*. FKM Universitas Airlangga.
8. Globila N, dkk. (2015). Pengetahuan Warga, Teknologi, Dan Pendampingan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Kelurahan Dawuhan Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 10. No. 1
9. Gubernur Kepulauan Riau. 2016. *Surat Edaran No. 0168/106/SET* tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dalam Rangka Percepatan Target Akses Universal Sanitasi 2019.
10. Hadiati S, dkk. (2018). Hubungan Pengetahuan, Sikap BAB, Dan Kepemilikan *Sptic Tank* Dengan Status ODF Di Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal)*. Vol. 6 No. 6. ISSN: 2356-3346.
11. Jayanti, A. (2012). Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama DI Wilayah Kerja Puskesmas Punggung

- Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010, *Skripsi*. Univeristas Airlangga-Surabaya: 14-37.
12. Kar, K and Chambers, R, 2008. *Handbook on Community-Led Total Sanitation*. London : Plan, UK.
 13. Kementerian Kesehatan RI. 2008. *Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008. Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta.
 14. Kementerian Kesehtan RI. 2014. *Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 15. Murwati. 2012. Faktor Host Dan Lingkungan Yang Mempengaruhi Perilaku Buang Air Besar Sembarangan. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Undip
 16. Notoatmodjo, S., 2010 (a). *Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
 17. Sustainable Development Goals. 2016. Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Edisi Revisi 2016.
 18. The World Bank Group. Verifikasi ODF di Komunitas STBM/TSSM. Diunduh pada 15 April 2018. [Online]. Diakses di www.sanitasi-total.org
 19. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
 20. WHO. 2018. *Progress on Sanitation and Drinking-Water 2018 Update*. Diakses dari www.unicef.org/eapro/JMP-2010
 21. Windy F, dkk. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS): Studi Pada Program STBM Di Desa Sumbarsari Metro Selatan 2016. *Jurnal Dunia Kesmas* Vol. 5. No. 3.
 22. Yatim, F. (2010). *Macam-Macam Penyakit Menular dan Pencegahannya*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.